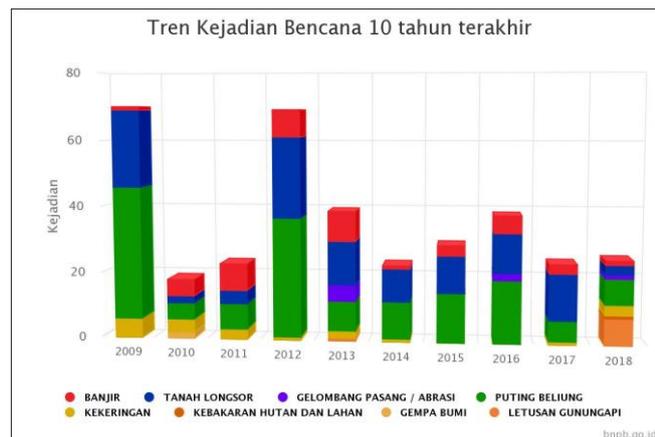


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dilihat dari kondisi geologi berada pada wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Aktivitas ketiga lempeng tektonik menghasilkan terbentuknya deretan gunung berapi dan patahan. Kondisi geologi tersebut memberikan dampak terhadap risiko bencana di Indonesia. Hal itu disebabkan karena aktivitas patahan tektonik dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami, sedangkan aktivitas gunung berapi dapat mengakibatkan bencana erupsi, tanah longsor, hingga banjir lahar dingin. Faktor geologi tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap kejadian bencana (BNPB, 2018). Faktor lain yang juga menyebabkan bencana adalah faktor hidrolgi atau cuaca, faktor biologi, dan perilaku manusia.



Grafik 1. Tren Kejadian Bencana di DIY 10 tahun terakhir

Sumber: Website Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, 2018

Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menyajikan data berupa tren kejadian bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 10 tahun terakhir (BNPB, 2018). Data di atas menunjukkan berbagai jenis bencana alam yang terjadi di DIY seperti banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, gempa bumi, dan puting beliung. Jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di DIY dalam 10 tahun terakhir adalah 70 kejadian di tahun 2009, 18 kejadian di tahun 2010, 23 kejadian di tahun 2011, 69 kejadian di tahun 2012, 39 kejadian di tahun 2013, 23 kejadian di tahun 2014, 29 kejadian di tahun 2015, 38 kejadian di tahun 2016, 24 kejadian di tahun 2017, dan 25 kejadian di tahun 2018.

Kejadian bencana menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh bencana rata-rata mencapai Rp 22 triliun setiap tahun, belum termasuk dengan kerugian jiwa (Tempo, 2018). Anggaran negara sebesar Rp 22 triliun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan atau program pembangunan lainnya. Selain jumlah bencana yang sering, kerugian yang besar juga dipengaruhi oleh luasnya wilayah daratan Indonesia yang mencapai 1.910.931 km² dan banyaknya jumlah penduduk yaitu mencapai 255.461.700 jiwa di tahun 2015 (BNPB, 2016). Bencana tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, dampak lain dari bencana adalah timbulnya korban jiwa, korban

luka, kerusakan lingkungan, terhambatnya aktivitas sosial ekonomi, serta memberikan trauma psikologis bagi korban.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang dibentuk pada 2008 sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan BNPB dalam upaya penanggulangan bencana adalah Program Desa Tangguh Bencana (Destana), yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Latar belakang pembuatan program destana adalah melihat realitas ancaman bencana di Indonesia dan pentingnya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pengurangan risiko bencana penting dilakukan karena sebelum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana resmi diundangkan, penanggulangan bencana di Indonesia berfokus pada kegiatan tanggap darurat. Pemerintah, pihak swasta, maupun LSM melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara responsif saat terjadi bencana. Kegiatan yang dilakukan umumnya adalah melakukan pertolongan pertama, membangun tenda darurat, menyediakan kebutuhan pokok pengungsi, hingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan tersebut dinilai kurang efektif, karena saat bencana kembali terjadi masyarakat tetap bingung dan panik tanpa tahu apa yang perlu dilakukan, selain itu korban jiwa dan kerugian yang dialami tetap

besar (Hidayati, 2008). Undang-undang No 24 tahun 2007 telah merubah paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya fokus pada tanggap darurat menjadi penanggulangan bencana yang komprehensif melakukan seluruh kegiatan dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana (Fatimahsyam, 2018). Keluarnya peraturan mengenai program desa tangguh bencana menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk lebih fokus melakukan penanggulangan bencana secara preventif.

Program Desa Tangguh Bencana merupakan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan saat bencana belum terjadi yaitu pada tahap pra bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengenai bencana (Kusumasari, 2014). Kegiatan kesiapsiagaan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang secara mandiri mampu merespon bencana secara cepat dan tepat berdasarkan pada pengetahuan dan pelatihan yang telah diberikan.

Pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) menurut Perka BKN adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memahami kondisi dan ancaman bencana di wilayahnya serta masyarakat yang dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana

melalui sumber daya yang ada. Subjek atau pelaku utama dari program destana ini adalah masyarakat.

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana Provinsi

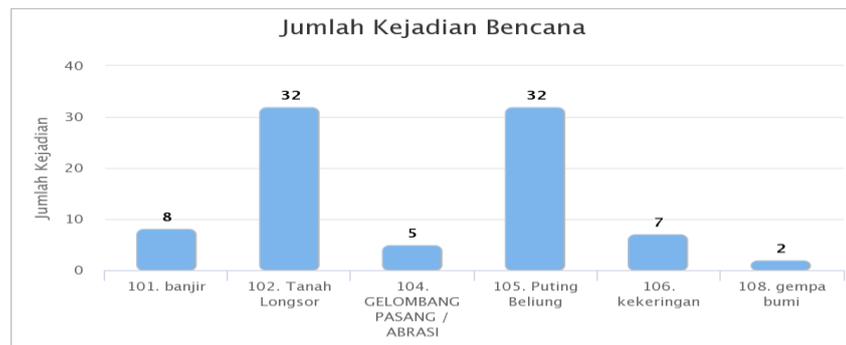
No	Provinsi	Skor	Kelas Risiko
1	Sulawesi Barat	191	Tinggi
2	Banten	180	Tinggi
3	Maluku	179	Tinggi
4	Nusa Tenggara Barat	172	Tinggi
5	Bengkulu	172	Tinggi
6	Jawa Timur	171	Tinggi
7	Bali	170	Tinggi
8	Maluku Utara	169	Tinggi
9	Sulawesi Tenggara	169	Tinggi
10	Sulawesi Selatan	167	Tinggi
11	Jawa Barat	166	Tinggi
12	DIY	165	Tinggi

Sumber: BNPB 2013 dalam (Nur Aini, 2018)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berdasarkan indeks risiko bencana termasuk dalam provinsi yang memiliki risiko ancaman bencana tinggi, dengan skor 165 berada pada urutan nomor 12 dari 33 provinsi di Indonesia (Nur Aini, 2018). Sasaran program desa tangguh bencana adalah desa yang masuk dalam kategori rawan bencana. DIY memiliki 301 desa rawan bencana, dari total 438 desa yang tersebar di 5 kabupaten dan kota. Sejauh ini hingga tahun 2018 sudah terdapat 218 desa di DIY yang diresmikan menjadi Desa Tangguh Bencana (Radar Jogja, 2018).

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana. Menurut Indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Bantul menempati posisi 82 dari 495 kabupaten di Indonesia dengan kelas risiko tinggi (Merryrna Anggriani, 2018). Bantul

memiliki risiko ancaman bencana tsunami karena berbatasan langsung dengan samudera Indonesia di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Bantul memiliki wilayah perbukitan di sisi timur dan barat yang rawan terhadap bencana longsor. Pada akhir 2018 sudah terbentuk 28 desa tangguh bencana di Bantul (Tribun Jogja.com, 2018).



Grafik 2. Jenis Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul tahun 2008-2018

Sumber: Website Data Informasi Bencana Indonesia BNPB, 2018

Bencana di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu 2008 hingga 2018 lebih banyak terjadi akibat faktor hidrologi atau cuaca. Berdasarkan grafik pada gambar di atas, beberapa bencana yang terjadi di Bantul diantaranya bencana banjir terjadi sebanyak 8 kali, tanah longsor 32 kali, gelombang pasang 5 kali, puting beliung 32 kali, kekeringan 7 kali, dan gempa bumi sebanyak 2 kali (DIBI BNPB, 2018). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Bantul adalah bencana tanah longsor dan puting beliung.

Bencana tanah longsor merupakan bencana yang menjadi salah satu ancaman terbesar di Kabupaten Bantul. Hasil kajian BPBD Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa terdapat 15 desa di 5 kecamatan

yang masuk dalam kategori zona merah bahaya longsor yang artinya memiliki risiko tinggi terhadap longsor. Desa yang masuk dalam kategori zona merah adalah Desa Srimartani dan Desa Srimulyo di Kecamatan Piyungan; Desa Wukirsari, Desa Sriharjo, Desa Girirejo, Desa Karangtengah, dan Desa Selopamioro di Kecamatan Imogiri; Desa Seloharjo di Kecamatan Pundong; Desa Wonolelo di Kecamatan Pleret serta seluruh desa di Kecamatan Dlingo yaitu Desa Mangunan, Muntuk, Terong, Temuwuh, Jatimulyo, dan Dlingo (Krijogja.com, 2016).

Tabel 2. Data Ancaman Zona Merah Tanah Longsor Desa Srimartani

No	Nama Dusun	Zona Merah		
		Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Bulusari	48	50	178
2	Umbulsari	26	26	96
3	Mojosari	32	33	114
4	Kemloko	18	19	65
5	Rejosari	9	9	30
6	Pos Piyungan	25	25	79
Total		158	162	562

Sumber : Dwi Wantoro dan Ardy, 2017

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Srimartani telah resmi menjadi desa tangguh bencana pada November 2017. Desa Srimartani ditetapkan menjadi destana karena Desa Srimartani merupakan salah satu diantara 15 desa yang berada di zona merah ancaman longsor. Sebagian besar wilayah Desa Srimartani memiliki risiko tinggi terhadap ancaman bencana tanah longsor. Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat total 158 rumah, 162 KK, dan 562 jiwa yang memiliki risiko tinggi terkena bencana tanah longsor di Desa Srimartani.

Selain risiko tinggi terhadap ancaman bencana tanah longsor, faktor lain yang menjadikan Desa Srimartani dipilih sebagai lokasi penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani dalam melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana. Desa Srimartani diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul yaitu BPBD Bantul menjadi destana pada November 2017, tetapi FPRB Desa Srimartani telah dibentuk sejak tahun 2012 dan telah melakukan beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana. Desa Srimartani juga merupakan wakil Kabupaten Bantul dalam lomba desa tangguh bencana se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018.

Maka dari itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana program desa tangguh bencana dijalankan, melalui indikator evaluasi. Evaluasi memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan sebuah program. Evaluasi membantu melihat sejauh mana tujuan program telah tercapai dan dimana letak kekurangan program, sehingga dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Program Destana di Srimartani juga perlu dievaluasi untuk melihat sudah sejauh mana masyarakat memahami kondisi ancaman bencana dan melakukan upaya mandiri untuk mengurangi risiko ancaman bencana yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Tahun 2017-2018 dijalankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani Tahun 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi evaluasi kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sejenis di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Mendapat pengetahuan tentang program manajemen bencana yang berfokus pada pengurangan risiko bencana yaitu desa tangguh bencana di Desa Srimartani, Bantul.

b. Bagi pemerintah

Memberikan informasi dan masukan untuk pemerintah khususnya Pemerintah Desa Srimartani dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik Kabupaten Bantul maupun DIY terkait dengan evaluasi program Desa Tangguh Bencana. Informasi dan masukan

bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada supaya program destana dapat terlaksana lebih baik dan tujuan program dapat tercapai.

c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terkait sejauh mana keberhasilan program desa tangguh bencana dan apa saja aspek yang perlu diperbaiki, karena masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan program. Masyarakat di sini termasuk anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), anggota tim relawan desa, dan seluruh masyarakat Desa Srimartani.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 3. Penelitian Terdahulu tentang Desa Tangguh Bencana

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
Merryana Anggriani dan Estuning Tyas Wulan Mei (2018)	Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana Mulyodadi Kabupaten Bantul	Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Terdapat 13 kegiatan desa tangguh bencana. Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut ada yang berupa pikiran, tenaga, ketrampilan maupun harta benda. Jenis kegiatan dengan partisipasi terlengkap adalah kegiatan tanggap darurat puting beliung dan badai cempaka. Masyarakat diberikan wewenang dalam mengelola program tetapi dalam hal persetujuan pengambilan keputusan masih menjadi kewenangan pemerintah.

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
Arnidha Kusumaratih (2016)	Manajemen Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Manajemen Desa Tangguh Bencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan. <i>Pertama</i> , perencanaan yang terdiri dari penyusunan regulasi, pembuatan profil kerentanan dan kapasitas, dokumen RAK, dan dokumen rencana kontinjensi. <i>Kedua</i> , pengorganisasian dilakukan dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim relawan. <i>Ketiga</i> , pengarahannya diberikan oleh BPBD, PMI, dan MDMC. Materi dalam pengarahannya tersebut adalah penanganan gempa dan tsunami, pertolongan pertama, dan penanganan kepada korban serius. <i>Keempat</i> , pengawasan berupa evaluasi di akhir kegiatan, pertemuan rutin Rabu pahing anggota FPRB dan pemerintah desa, laporan tahunan, serta laporan rutin kondisi desa kepada BPBD.
Nabella Hastin P (2018)	Persepsi Masyarakat terhadap Program Desa Tangguh Bencana di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Tahun 2017	Metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan metode <i>random sampling</i> .	Terdapat 3 aspek utama yang menjadi indikator penilaian persepsi, yaitu aspek kognitif, afeksi, dan konatif. Persepsi masyarakat pada aspek kognitif masyarakat sangat paham, pada aspek afeksi masyarakat sangat peduli, dan pada aspek konatif masyarakat kurang mendukung.
Nurtiana Noza (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Tangguh Bencana di Desa Teluk	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengambilan data	Kegiatan Desa Tangguh Bencana yang sudah dilaksanakan adalah sosialisasi mengenai desa tangguh bencana,

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
	Bakau Kabupaten Bintan	melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB), pembuatan pemecah gelombang, dan penanaman mangrove. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa tangguh bencana, tetapi masyarakat masih sangat bergantung kepada pemerintah sehingga pelaksanaan program sering terhambat dan tujuan untuk mencapai kemandirian belum tercapai.
Miftakhul Munir (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kendal Tahun 2016	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Program Destana di Kabupaten Kendal sudah terlaksana melalui beberapa kegiatan yaitu : sosialisasi, pelatihan manajemen bencana, mengkaji risiko bencana, membuat alat pendeteksi dini bencana alam, water rescue, pertolongan pertama, pendirian posko bencana, psikososial pasca bencana, dan pengendalian dapur umum ataupun logistik.
Ahmad Buchari, Meilanny Budiarti Santoso, dan Nina Marlina (2017)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Pengembangan kapasitas kelembagaan Desatana di Desa Pasawahan belum berjalan secara optimal. Kapasitas kelembagaan dinilai berdasarkan pengembangan SDM, penguatan kapasitas organisasi, dan strategi reformasi kelembagaan. Pengembangan SDM dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan, sosialisasi, dan simulasi yang dilakukan hanya sekali belum secara berkala. Penguatan kapasitas

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
			kelembagaan belum optimal karena dokumen usulan FPRB belum disahkan menjadi perdes dan belum adanya sekretariat FPRB karena kendala dana. Sedangkan dalam hal strategi reformasi kelembagaan belum terintegrasinya konsep destana ke dalam RPJMDes.
Febriana, Didik Sugiyanto, dan Yusya Abubakar (2015)	Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan metode pengumpulan data kuisisioner dan wawancara.	Penelitian ini mengambil sampel beberapa pegawai BPBD, pegawai kecamatan, dan masyarakat untuk meneliti mengenai kesiapsiagaan yang diukur melalui 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap, rencana tanggap darurat, dan system peringatan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan pegawai BPBD, pegawai kecamatan, maupun masyarakat masuk dalam kategori baik. Sedangkan faktor kesiapsiagaan yang perlu untuk ditingkatkan adalah faktor pengetahuan tentang bencana.
Desy Nirmala Setyawati dan Argo Pambudi (2018)	Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo, Cangkringan, Sleman, DIY	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Efektivitas pelaksanaan program destana di Desa Argomulyo diukur menggunakan 4 indikator menurut Budiiani yaitu: <i>Pertama</i> , ketepatan sasaran. Sasaran dalam program destana adalah masyarakat, pemerintah, dan komunitas. Destana di Desa Argomulyo dinilai tepat sasaran karena masyarakat, pemerintah, dan komunitas berpartisipasi dalam program destana

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
			<p>dengan melakukan peran masing-masing.</p> <p><i>Kedua</i>, sosialisasi program. Sosialisasi program yang disampaikan oleh BPBD Sleman kepada masyarakat berjalan dengan baik. Materi sosialisasi yaitu mengenai pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.</p> <p><i>Ketiga</i>, tujuan program. Kelima tujuan program destana tercapai dengan baik.</p> <p><i>Keempat</i>, pemantauan program. Pemantauan program dilakukan oleh BPBD Sleman dan pemerintah Desa Argomulyo.</p>
Nur Aini, Irma Fitriana Ulfah, dan Laode Machdani Afala (2018)	Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sironoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	<p>Penelitian ini mengukur efektivitas program destana menggunakan teori efektivitas milik Lubis dan Huseini yaitu:</p> <p><i>Pertama</i>, pendekatan sumber. Sumber disini terdiri dari sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber sarana prasarana. Pendekatan sumber dinilai belum efektif karena jumlah relawan minim, anggaran untuk melakukan kegiatan kebencanaan masih kurang, dan sarana prasarana masih kurang terutama unutup tanggap darurat.</p> <p><i>Kedua</i>, pendekatan proses. Proses penanggulangan bencana mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan kesiapsiagaan, kegiatan tanggap darurat, dan pemulihan. Kendala pada proses adalah sumber daya</p>

Nama Penulis	Judul	Metodologi Penelitian	Temuan
			<p>manusia yang belum siap menghadapi bencana.</p> <p><i>Ketiga</i>, pendekatan sasaran. Sasaran pada program destana adalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kegiatan untuk sasaran lingkungan seperti kebersihan antar kampung, bank sampah dan perbaikan saluran air. Kegiatan untuk ekonomi adalah industri kecil rumahan. Sedangkan kegiatan untuk sasaran sosial adalah mengutamakan kelompok rentan pada evakuasi.</p>

Tabel di atas merupakan tabel penelitian terdahulu yang membahas mengenai program desa tangguh bencana dan beberapa program penanggulangan bencana lainnya. Perbedaan penelitian terdahulu yang membahas mengenai Desa Tangguh Bencana, dengan penelitian ini adalah permasalahan yang diteliti dalam program desa tangguh bencana dan juga teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian terdahulu yaitu (Hastin, 2018) menggunakan teori persepsi, (Merryana Anggriani, 2018) dan (Noza, 2018) menggunakan teori partisipasi masyarakat, (Ahmad Buchari, 2017) dengan teori pengembangan kapasitas kelembagaan, (Febriana, 2015) dengan teori kesiapsiagaan, (Kusumaratih, 2016) dengan teori manajemen desa tangguh bencana, serta (Pambudi, 2018) dan (Nur Aini, 2018) dengan teori efektivitas. Program desa tangguh bencana memiliki banyak persoalan

yang dapat diteliti dan dianalisa menggunakan berbagai macam teori. Sedangkan penelitian ini mencoba membahas mengenai bagaimana program desa tangguh bencana dijalankan dengan indikator teori evaluasi program.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu milik (Miftakhul Munir, 2017) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016. Perbedaan penelitian ini terletak di lokasi penelitian yang diambil dan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi program destana. Penelitian terdahulu di lakukan di Desa Tlogopayung dan Desa Kebondalem Kabupaten Kendal, sedangkan lokasi penelitian ini berada di Desa Srimartani, Bantul. Indikator evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator *context, input, process, dan product* menurut Daniel Stufflebeam. Sedangkan (Miftakhul Munir, 2017) dalam penelitiannya hanya memaparkan mengenai kegiatan dalam program desa tangguh bencana beserta hambatan dalam pelaksanaan program.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Evaluasi

a. Definisi Evaluasi

William N Dunn (2003) menyamakan istilah evaluasi dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan pemberian nilai (*assessment*). Secara lebih spesifik William N Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai bentuk penilaian sejauh mana hasil kebijakan dapat memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran kebijakan (Dunn, 2003).

Riant N Dwijowijoto (2003) menyatakan bahwa evaluasi digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan dicapai, sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen, dan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan pencapaian. Kesenjangan antara harapan dan pencapaian bukan bertujuan untuk “menyalahkan”, tetapi harus dilihat secara positif sebagai kesempatan untuk memperbaiki atau mengurangi kesenjangan yang ada (Dwijowijoto, 2004). Mustopadijaja (2002) dalam (Widodo, 2007) menjelaskan secara lebih detail fenomena yang dinilai dalam evaluasi kebijakan atau program adalah tujuan, sasaran, kelompok sasaran, instrument kebijakan, respon dari lingkungan, kinerja, dan dampak kebijakan.

b. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa fungsi dalam analisis kebijakan yaitu (Dunn, 2003):

Pertama, memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dimaksud adalah sejauh mana kebutuhan, nilai, tujuan, dan kesempatan telah berhasil dicapai. Secara sederhana evaluasi berfungsi untuk menilai apakah kebijakan berhasil atau tidak.

Kedua, memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan. Evaluasi memiliki fungsi untuk menguji kepantasan tujuan dan sasaran, mengapa tujuan dan sasaran tersebut yang dipilih untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Ketiga, memberikan rumusan masalah dan rekomendasi ulang tentang kebijakan yang telah dievaluasi. Evaluasi dapat berfungsi untuk merumuskan alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang sudah ada. Hal itu dapat dilakukan apabila kinerja kebijakan yang sudah ada tidak memadai atau tujuan dan target yang ada perlu didefinisikan ulang.

c. Kriteria Evaluasi

Evaluasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penilaian berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan atau program. Untuk mengukur sebuah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, dalam tahap evaluasi diperlukan sebuah kriteria penilaian. Berikut merupakan kriteria evaluasi menurut (Dunn, 2003) :

1) Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas bertujuan untuk melihat sejauh mana setiap alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menilai efektivitas bisa membandingkan tujuan awal dengan tujuan yang berhasil dicapai. Efektivitas dapat diukur dari unit produk atau layanan sebuah kebijakan.

2) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat efektivitas tertentu. Bentuk efisiensi selalu

berhubungan dengan besaran anggaran yang dibutuhkan. Sebuah kebijakan atau program dapat dikatakan efisien apabila kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara efektif dengan mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar. Efisiensi mengikuti rumus ekonomi yakni biaya sekecil-kecilnya untuk hasil yang maksimal.

3) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4) Kesamaan

Kesamaan atau pemerataan dalam kebijakan publik adalah kebijakan yang dikeluarkan memiliki nilai keadilan bagi masyarakat, terutama sasaran kebijakan. Kebijakan dapat dikatakan baik apabila efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat (adil). Indikator adil dalam pemerataan bukan berarti seluruh kelompok dalam masyarakat harus mendapatkan hal yang sama, unsur lain seperti kemampuan ekonomi bisa menjadi unsur yang membedakan. Sebagai contoh masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi membayar dengan jumlah yang lebih sedikit.

5) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Hal ini berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas selalu melibatkan penilaian masyarakat untuk bisa memberikan komentar atas penilaian pelaksanaan yang sudah optimal atau belum.

6) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan - tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Selain kriteria evaluasi Dunn, Daniel Stufflebeam mengembangkan model evaluasi program yang dikenal dengan istilah CIPP yaitu *context* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses), dan *product* (hasil). Model evaluasi CIPP ini awalnya digunakan untuk mengevaluasi *ESEA* (*the*

Elementary and Secondary Education Act) sehingga model evaluasi CIPP ini banyak digunakan untuk mengevaluasi kurikulum maupun program pendidikan. Walau begitu model evaluasi CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang (Mahmudi, 2011).

Kelebihan dari evaluasi CIPP adalah evaluasi yang bersifat komprehensif, karena evaluasi CIPP memiliki tujuan untuk mengevaluasi sistem secara keseluruhan. Stufflebeam (1993) dalam (Mahmudi, 2011) berpendapat bahwa inti dari sebuah evaluasi bukan untuk membuktikan (*to prove*) sebuah program berhasil atau tidak, melainkan untuk meningkatkan (*to improve*). Maka dari itu diperlukan identifikasi secara keseluruhan dari dimensi konteks, input, proses, dan hasil yang bertujuan untuk mengetahui letak kelebihan dan kekurangan program. Evaluasi program diharapkan dapat membantu administrator untuk memutuskan apakah program ini dapat dilanjutkan, dilanjutkan dengan modifikasi, atau diberhentikan dengan alternatif program lain (Mahmudi, 2011). Pengambilan keputusan tersebut perlu dilakukan supaya permasalahan yang melatar belakangi program dapat terselesaikan dan tujuan program dapat tercapai. Evaluasi model CIPP memiliki peran dalam pengambilan keputusan (evaluasi formatif) maupun penyajian informasi mengenai akuntabilitas program (evaluasi sumatif) (Mahmudi, 2011).

Berikut merupakan dimensi atau komponen dari model evaluasi CIPP yang dinyatakan oleh Stufflebeam dalam (Muryadi, 2017; Mahmudi, 2011) :

1) Konteks (*Context*)

Evaluasi konteks adalah evaluasi yang bertujuan untuk menilai atau menganalisis lingkungan program. Pada evaluasi konteks evaluator dapat mengidentifikasi latar belakang permasalahan dari program yang ada, apa sasaran program dan apa saja kebutuhan sasaran. Setelah mengetahui hal tersebut evaluator dapat menganalisis apakah tujuan program yang sudah ditentukan cukup responsif untuk memenuhi kebutuhan sasaran program. Jadi evaluasi konteks memiliki fungsi untuk menilai apakah tujuan dan prioritas yang sudah ditentukan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang menjadi sasaran organisasi

2) Masukan (*Input*)

Evaluasi input bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya dan strategi telah disiapkan untuk keberlangsungan program. Sumber daya yang perlu dinilai dalam evaluasi input ini diantaranya kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana penunjang program, hingga sumber pembiayaan program. Sedangkan pada aspek strategi dapat dinilai mengenai prosedur pelaksanaan, dokumen perencanaan, dan jadwal kegiatan. Kualitas input dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah program.

3) Proses (*Process*)

Evaluasi proses bertujuan untuk menilai apakah program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pada evaluasi proses selain menilai bagaimana perencanaan diimplemmentasikan juga menilai efisiensi penggunaan sumber

daya yang ada. Evaluasi proses mengamati keberlangsungan program dan mencatat hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan.

4) Hasil (*Product*)

Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai keberhasilan program. Pada evaluasi hasil terdapat beberapa hal yang harus dianalisis yaitu apakah program telah berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran, dampak program terhadap masyarakat, dan keberlanjutan program. Keberlanjutan program adalah kesimpulan berupa saran apakah program perlu dilanjutkan, dilanjutkan dengan modifikasi, atau dihentikan berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah didapatkan.

1.6.2 Bencana

a. Definisi Bencana

Bencana didefinisikan secara beragam oleh para ilmuwan, organisasi penelitian, maupun organisasi kemanusiaan. Keberagaman penafsiran mengenai bencana muncul dari perbedaan perspektif dalam melihat bencana. Berikut merupakan definisi bencana menurut para ahli dan organisasi:

Bencana menurut *Asian Disaster Reduction Center* (2003) dan *United Nations* (1992) dalam (Kusumasari, 2014) adalah suatu gangguan serius yang melebihi kemampuan masyarakat terdampak yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. *Centre for Research on the Epidemiology of Disaster (CRDE)* dalam (Kusumasari,

2014) mendefinisikan bencana sebagai suatu kejadian yang melemahkan kapasitas lokal sehingga memerlukan bantuan eksternal baik dari level nasional maupun internasional. *Indian Institute of Disaster Management* (2007) dalam (Kusumasari, 2014) menyebutkan bahwa bencana merupakan kejadian yang muncul tanpa adanya peringatan sebelumnya yang menyebabkan ancaman serius bagi kehidupan.

Para ilmuwan dan organisasi-organisasi mengidentifikasi bencana menjadi lebih jelas melalui beberapa karakteristik. Carter (1991) dalam (Kusumasari, 2014) menyebutkan 4 karakteristik yang membedakan bencana dengan kejadian lainnya. *Pertama*, fokus pada kekacauan yaitu kecepatan terjadinya bencana dan luas wilayah terdampak. *Kedua*, dampak bencana terhadap manusia seperti jumlah korban jiwa dan cedera. *Ketiga*, kerusakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan, seperti komunikasi. *Keempat*, kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan, seperti tenaga kesehatan, tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

UN-ISDR (2002) dalam (Nurjannah dkk, 2012) berbeda dengan Carter mengidentifikasi karakteristik bencana menjadi 5 kriteria. *Pertama*, terdapat peristiwa. *Kedua*, dapat terjadi karena faktor alam maupun karena ulah manusia. *Ketiga*, dapat terjadi secara tiba-tiba maupun secara berlahan. *Keempat*, menimbulkan kerugian berupa korban jiwa, harta benda, social ekonomi, dan kerusakan lingkungan. *Kelima*, diluar kapasitas masyarakat untuk menagulanginya.

Berdasarkan definisi dan karakteristik bencana menurut para ahli di atas, maka bencana dapat didefinisikan sebagai kejadian luar biasa yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, terhambatnya aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta memberikan trauma psikologis bagi korban. Bencana merupakan kejadian yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat dan pemerintah setempat sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar untuk merespon secara cepat dan memulihkan dengan segera.

b. Jenis-jenis Bencana

Shaluf (2007) mengkalsifikasikan bencana menjadi tiga jenis yaitu (Kusumasari, 2014):

1) Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang faktor dan sumber penyebab terjadinya peristiwa adalah alam. Bencana alam dikategorikan menjadi 3 jenis. *Pertama*, bencana geologi adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas patahan tektonik dan aktivitas gunung berapi. Aktivitas patahan tektonik dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami, sedangkan aktivitas gunung berapi dapat mengakibatkan bencana erupsi gunung berapi, tanah langsor, hingga banjir lahar dingin. *Kedua*, bencana hidrologi adalah bencana yang disebabkan karena faktor cuaca. Bencana yang terjadi karena faktor cuaca diantaranya adalah banjir, banjir bandang, angin topan, kekeringan, pasang air laut, dan

kebakaran hutan. *Ketiga*, bencana biologi adalah bencana yang disebabkan oleh penyakit atau epidemi hewan dan tumbuhan.

2) Bencana buatan manusia

Bencana hasil buatan manusia adalah bencana yang terjadi bukan karena faktor alam tetapi karena murni perbuatan manusia. Shaluf (2007) mengklasifikasikan bencana buatan manusia menjadi 2 jenis. *Pertama*, bencana sosial diantaranya kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, runtuhnya struktur bangunan, dan kesalahan desain teknologi. *Kedua*, kedaruratan kompleks atau bencana yang jarang terjadi tetapi memiliki dampak yang besar seperti konflik sosial, terorisme, dan perang.

3) Bencana hibrida

Bencana hibrida adalah bencana yang penyebab terjadinya terdapat keterkaitan antara perilaku manusia dan alam. Contoh dari bencana hibrida antara lain polusi laut akibat pembuangan minyak, erosi tanah akibat perusakan hutan, dan menyebarnya wabah penyakit dari satu orang ke masyarakat yang tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat.

c. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala aspek mengenai bencana terutama risiko bencana dan cara untuk menghindari risiko bencana (Nurjannah dkk, 2012). Shaluf (2008) dalam (Kusumasari, 2014) mendefinisikan manajemen bencana sebagai semua

aspek yang dilakukan untuk merespon bencana, baik kegiatan yang dilakukan sebelum bencana maupun setelah bencana. Kelly (1995) dalam (Kusumasari, 2014) mendefinisikan manajemen bencana sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan memobilisasi sumber daya untuk menangani semua fase bencana.

Terdapat empat tahapan atau siklus dalam manajemen bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Kusumasari, 2014):

1) Mitigasi

Mitigasi menurut King (2007) dalam (Kusumasari, 2014) adalah tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak bencana. Senada dengan King, *Federal Emergency Management Agency* (2006) dalam (Kusumasari, 2014) mendefinisikan mitigasi sebagai kegiatan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi darurat yang mengakibatkan dampak kerusakan. Coppola (2007) dalam (Kusumasari, 2014) mitigasi merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi risiko bencana.

Coppola mengategorikan mitigasi menjadi dua yaitu struktural dan non struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan fisik. Upaya mitigasi struktural diantaranya adalah ketahanan konstruksi, struktur bangunan, relokasi, dan sistem pendeteksi. Sedangkan mitigasi non struktural

adalah upaya pengurangan risiko bencana melalui perilaku manusia. Kegiatan atau contoh upaya mitigasi non struktural adalah penyusunan regulasi, kesadaran masyarakat, dan program pendidikan.

2) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan maupun mitigasi keduanya merupakan kegiatan manajemen bencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana atau pra bencana. Perbedaan antara mitigasi dan kesiapsiagaan menurut Mc Entrie dan Myers (2004) dalam (Kusumasari, 2014) adalah mitigasi menganggap bahwa bencana dapat dicegah atau dikurangi dampaknya, sedangkan kesiapsiagaan mengasumsikan bahwa bencana akan terjadi dan masyarakat harus siap menghadapi bencana. Nurjannah, dkk (2013) membedakan mitigasi dan kesiapsiagaan dengan menyebutkan bahwa mitigasi dilaksanakan pada situasi tidak terjadi bencana, sedangkan kesiapsiagaan pada situasi terdapat potensi ancaman bencana (Nurjannah dkk, 2012). Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan.

Bevaola (2014) memaknai kesiapsiagaan sebagai rencana tindakan saat terjadi bencana. Gillespie dan Streeter (1987) dalam (Kusumasari, 2014) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai serangkaian tindakan perencanaan, identifikasi sumber daya, pelatihan dan simulasi serta sistem peringatan dini yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas respon masyarakat saat terjadi bencana.

Drabek dan Hoetmar (1991) dalam (Kusumasari, 2014) menjelaskan tujuh prinsip dasar kesiapsiagaan yaitu: *Pertama*, kesiapsiagaan merupakan proses yang berkesinambungan. Perencanaan dalam kesiapsiagaan harus selalu diperbarui berdasarkan pada kondisi dan kebutuhan. *Kedua*, kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan selama bencana. Tujuan dari kesiapsiagaan adalah mencoba mengurangi dampak bencana dengan meningkatkan kemampuan masyarakat. *Ketiga*, kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan. Kesiapsiagaan harus disosialisasikan dan dilatih kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apa yang perlu dilakukan saat bencana dan sesudah bencana. *Keempat*, kesiapsiagaan didasarkan pada pengetahuan. Perencanaan dalam kesiapsiagaan yang bertujuan untuk mengurangi masalah dan mencari solusi didasarkan pada pengetahuan seperti risiko bencana, kerentanan, dan kapasitas. *Kelima*, kesiapsiagaan menyebabkan timbulnya tindakan yang cepat dan tepat. *Keenam*, kesiapsiagaan memerlukan kepemimpinan dari pejabat publik. *Ketujuh*, kesiapsiagaan harus direncanakan secara sederhana dan jelas.

Auf der Heide (1989) dalam (Kusumasari, 2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang biasanya terjadi dalam kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan memerlukan partisipasi masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus masyarakat bersikap apatis. Selain

masyarakat yang kadang bersikap apatis rencana kesiapsiagaan seringkali tersedia tetapi tidak disosialisasikan dan dilatih.

3) Tanggap darurat

Tanggap darurat atau respon menurut (Kusumasari, 2014) adalah kegiatan yang dilakukan sebelum, selama, dan segera setelah bencana terjadi dengan tujuan untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, kerusakan harta benda dan lingkungan. Tanggap darurat lebih jelasnya dilakukan pada tahap siaga darurat, saat terjadi bencana, dan pada fase transisi dari darurat ke pemulihan (Nurjannah dkk, 2012).

Tujuan dari kegiatan tanggap darurat menurut (Nurjannah dkk, 2012) yaitu: *Pertama*, mencegah bertambahnya korban dan kerugian. *Kedua*, meringankan penderitaan korban dengan memenuhi kebutuhan dasar. *Ketiga*, menstabilkan kondisi korban dan pengungsian. *Keempat*, mengamankan asset vital yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti jaringan listrik dan telekomunikasi. *Kelima*, menyediakan pelayanan dasar pasca darurat seperti memperbaiki sarana prasarana dan pelayanan umum. *Keenam*, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, orang sakit, dan difabel.

Kondisi darurat dibagi menjadi tiga periode yaitu: *Pertama*, periode panik. Periode panik adalah periode yang terjadi pada saat bencana terjadi hingga sehari-hari setelah bencana. Pada periode ini

suasana yang terjadi adalah panik, kacau, bingung, tanpa ada informasi dan pihak yang mengambil tanggung jawab karena pihak pemerintah setempat juga merupakan korban. Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan pada periode panik adalah evakuasi korban, pemakaman, dan pelayanan medis.

Kedua, periode darurat terkendali. Pada periode ini situasi panik sudah mulai terkendali dan masyarakat sudah mendapatkan informasi mengenai bencana dari berbagai sumber. Kegiatan pada periode darurat terkendali adalah distribusi bantuan pangan dan kebutuhan pokok, distribusi logistik seperti bahan bakar, penyediaan kebutuhan listrik, perbaikan sementara akses jalan yang rusak, pendirian hunian sementara, dan penanganan layanan medis.

Ketiga, periode darurat lanjutan. Pada periode ini kondisi darurat sudah berakhir dan menuju pada kondisi normal. Masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas sosial ekonomi walaupun belum kembali seperti semula. Kegiatan pada periode darurat lanjutan adalah percepatan dan penuntasan penanganan dan pemulihan darurat serta melakukan persiapan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada periode ini juga tetap dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat hingga masyarakat dinilai mampu menjalani hidup secara mandiri.

4) Pemulihan

Pemulihan menurut Sullivan (2003) dalam (Kusumasari, 2014) adalah kegiatan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat kepada

kondisi normal pasca bencana, salah satunya dengan cara mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasional minimal. Pemulihan terdiri dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana supaya dapat berfungsi secara minimal. Tujuan dari rehabilitasi adalah berjalannya pelayanan publik dan aktivitas masyarakat. Sedangkan rekonstruksi adalah upaya pembangunan kembali sarana, prasarana, dan fasilitas umum. Tujuan dari rekonstruksi adalah menumbuh kembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Rekonstruksi merupakan rencana jangka panjang dan membutuhkan dana yang tidak sedikit (Nurjannah, 2012).

1.6.3 Desa Tangguh Bencana (Destana)

a. Latar Belakang Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. BNPB dalam program ini hanya memiliki fungsi pembuat kebijakan dan koordinasi, selanjutnya program ini dilaksanakan oleh masyarakat desa dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota sebagai fasilitator yang menyediakan sumber daya untuk pengembangan program. Beberapa hal yang melatar belakangi program Desa Tangguh Bencana adalah realitas mengenai

ancaman bencana yang ada di Indonesia, dan urgensi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

b. Definisi Desa Tangguh Bencana

Program Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu program alternatif dalam penanggulangan bencana di Indonesia karena merupakan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional No 1 Tahun 2012 adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera. Masyarakat desa melalui serangkaian aktivitas program desa tangguh bencana diharapkan dapat memahami kondisi dan ancaman bencana di wilayahnya, mengurangi kerentanan yang ada, serta meningkatkan kapasitas untuk menghadapi bencana melalui sumber daya desa.

c. Tujuan Desa Tangguh Bencana

Tujuan khusus dari program desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BKN yaitu: *Pertama*, melindungi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dari kerugian akibat bencana. *Kedua*, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. *Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. *Keempat*, meningkatkan kapasitas

pemerintah dalam memberikan dukungan fasilitas dan teknis untuk pengembangan destana. *Kelima*, meningkatkan kerjasama semua pihak untuk upaya pengurangan risiko bencana baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM, perguruan tinggi dan kelompok lainnya.

d. Kriteria Umum Desa Tangguh Bencana

Komponen-komponen atau kriteria umum yang harus ada pada desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2012 adalah :

1) Legislasi

Legislasi berbentuk peraturan desa yang mengatur tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

2) Perencanaan

Perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa, Rencana Kontinjensi, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas.

3) Kelembagaan

Kelembagaan dalam destana adalah pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah desa serta pembentukan relawan desa.

4) Pendanaan

Rencana anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan destana dapat bersumber dari APBD kabupaten, APBDes, dana mandiri masyarakat, maupun bantuan dari LSM dan swasta.

5) Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas untuk FPRB, relawan, perangkat desa, maupun masyarakat. Pengembangan kapasitas dapat berupa sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang bertujuan menambah pengetahuan dan skill dalam kegiatan kebencanaan.

6) Penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan mulai tahap pra bencana yaitu kegiatan mitigasi baik struktural maupun non struktural, kegiatan kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Kemudian kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana dan pemulihan setelah bencana.

e. Prinsip Desa Tangguh Bencana

Program Desa Tangguh Bencana dilaksanakan berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu:

- 1) Bencana adalah urusan bersama
- 2) Berbasis pengurangan risiko bencana
- 3) Bentuk pemenuhan hak masyarakat
- 4) Masyarakat merupakan pelaku utama
- 5) Dilakukan secara partisipatoris
- 6) Memobilisasi sumber daya local

- 7) Inklusif
- 8) Berlandaskan kemanusiaan
- 9) Keadilan dan kesetaraan gender
- 10) Keberpihakan pada kelompok rentan
- 11) Transparansi dan akuntabilitas
- 12) Kemitraan
- 13) Multi ancaman
- 14) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan
- 15) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan
- 16) Diselenggarakan secara lintas sektor

f. Kegiatan Desa Tangguh Bencana

Tujuan dari program Desa Tangguh Bencana dapat terwujud dengan serangkaian kegiatan yang bersifat berkelanjutan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa. Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana yaitu (BNPB, 2016) :

Pertama, sosialisasi pengenalan program desa tangguh bencana. Sosialisasi mengenai program destana harus disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat desa atau perwakilan setiap kelompok masyarakat. Sosialisasi menjelaskan mengenai tujuan program, hasil atau target program, proses kegiatan, pendanaan, peran dari setiap pelaku, hingga pembentukan kelompok kerja destana. Sosialisasi bertujuan supaya masyarakat memahami maksud dan tujuan program sehingga tergerak untuk terlibat dalam program.

Kedua, penyusunan dokumen kajian dan peta risiko bencana. Kajian dan peta risiko bencana diperoleh melalui pengkajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di desa. Ancaman bencana adalah kejadian yang dapat menimbulkan bencana. Pengkajian mengenai ancaman bencana membahas mengenai jenis-jenis ancaman serta dampaknya terhadap masyarakat. Kerentanan adalah kondisi negatif yang mengurangi kemampuan masyarakat dalam mencegah, mengurangi dampak dan menghadapi bencana. Bentuk kerentanan yang biasanya terdapat di Indonesia adalah wilayah yang rawan bencana, tidak memiliki pengetahuan mengenai bencana, dan kebijakan pembangunan tidak sensitif terhadap bencana. Sedangkan kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki sehingga mampu untuk mencegah atau mengurangi ancaman serta memulihkan diri dengan segera setelah bencana. Hasil kajian dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas akan menghasilkan kajian risiko bencana.

Ketiga, pengembangan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat saat terdapat ancaman bencana. Sumber peringatan berasal dari instansi resmi seperti BMKG dan BPBD. Empat hal yang perlu dilakukan adalah memahami bahaya dan risiko bencana, memantau layanan peringatan, menyebarluaskan informasi peringatan kepada masyarakat, dan segera melakukan evakuasi sesuai perencanaan.

Keempat, penyusunan rencana evakuasi. Evakuasi adalah memindahkan masyarakat beserta harta bendanya ke tempat yang aman sebelum bencana terjadi. Rencana evakuasi membahas mengenai tempat evakuasi, jalur *evakuasi*, peta evakuasi, dan cara/strategi evakuasi. *Kelima*, penyusunan rencana kontinjensi. Perencanaan kontinjensi adalah perencanaan tanggap darurat saat terdapat ancaman bencana. Rencana kontinjensi berisi skenario tanggap darurat yang membahas sampai pada masalah teknis seperti apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan, dengan sumber daya apa. Tujuan dari rencana kontinjensi adalah warga dapat menyelamatkan diri dan mendapatkan hak-hak dasar pasca bencana.

Kelima, pembuatan dan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRB). Fungsi dari forum pengurangan risiko bencana adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dalam upaya pengurangan risiko bencana serta sebagai forum yang memfasilitasi kerjasama antar pihak. Forum ini harus terbentuk dengan anggota yang merepresentasikan setiap kelompok di desa tersebut seperti perwakilan dari unsur pemerintah desa, setiap wilayah dusun, perempuan, kaum difabel, lembaga usaha, kelompok masyarakat, dan kelompok profesi.

Keenam, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB). Pemerintah desa bersama perwakilan dari masyarakat menyusun rencana tindakan pengurangan risiko bencana baik itu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rekonstruksi dan rehabilitasi untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini nantinya menjadi acuan dalam menyusun program

pembangunan desa yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. RPB juga memuat Rencana Aksi Komunitas (RAK).

Ketujuh, pembentukan kelompok relawan. Relawan yang berasal dari masyarakat desa dibutuhkan karena tindakan akan lebih cepat dilakukan. Relawan dibutuhkan untuk kegiatan pertolongan pertama, pencarian korban, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pembentukan kelompok relawana bertujuan supaya terbentuk organisasi yang baik dan terbina secara berkelanjutan. Relawan akan mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.

Kedelapan, integrasi RPB dan RAK ke RPJM dan RKP Desa. RPB dan RAK merupakan rencana prioritas untuk melindungi masyarakat desa dari ancaman bencana yang merupakan bagian dari upaya pembangunan, sehingga perlu untuk diintegrasikan ke dalam RPJM dan RKP Desa. Integrasi ini menjadi penting karena segala program yang ada di desa apabila membutuhkan dana baik dari Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBDes) maupun Dana Alokasi Desa (ADD) harus tertera dalam RPJM dan RKP Desa. RPB dan RKP yang tidak terintegrasikan nantinya akan mendapatkan kendala di pelaksanaan maupun pendanaan.

Kesembilan, mensosialisasikan hasil program ke masyarakat. Kajian risiko bencana, rencana sistem peringatan dini, rencana evakuasi, rencana kontinjensi, perencanaan penanggulangan bencana, dan rencana aksi komunitas sudah dibuat. Maka perencanaan tersebut harus disosialisasikan ke masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah membangun kesadaran

kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kesepuluh, simulasi sistem peringatan dini, rencana evakuasi, dan rencana kontinjensi. Simulasi bertujuan sebagai wadah pembelajaran masyarakat supaya saat terjadi bencana masyarakat sudah tau apa yang perlu dilakukan. *Kesebelas*, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kemajuan dan ada tidaknya perubahan setelah program desa tangguh bencana.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Evaluasi merupakan suatu proses penilaian secara sistematis sejauh mana sebuah kebijakan atau program dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan sasaran. Fungsi evaluasi bukan hanya untuk membuktikan (*to prove*) sebuah program berhasil atau gagal, tetapi untuk memperbaiki (*to improve*) program. Definisi tersebut merujuk pada teori evaluasi program Daniel Stuffleabem yaitu evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan melalui dimensi *context*, *input*, *process*, dan *product*. Evaluasi pada penelitian ini masuk ke dalam jenis *post evaluation*, yaitu evaluasi terhadap program desa tangguh bencana di Desa Srimartani yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018.
2. Bencana adalah kejadian luar biasa yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, terhambatnya

aktivitas sosial ekonomi, dan melumpuhkan kapasitas lokal sehingga memerlukan bantuan dari pihak luar.

3. Desa Tangguh Bencana adalah program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menghadapi bencana dengan cara memahami kondisi dan ancaman bencana di wilayahnya, mengurangi kerentanan yang ada, serta meningkatkan kapasitas melalui sumber daya desa.

1.8 Definisi Operasional

Penelitian Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani Tahun 2017-2018 ini merujuk kepada teori Daeniel Stufflebeam tentang model evaluasi program. Teori Stufflebeam memiliki empat dimensi yang digunakan untuk mengukur evaluasi sebuah program, yaitu:

Tabel 4. Definisi Operasional

No	Komponen Evaluasi	Indikator	Parameter
1	<i>Context</i>	a. Latar belakang program	1) Latar belakang risiko ancaman bencana di Desa Srimartani 2) Latar belakang adanya program destana di Desa Srimartani diinisiasi oleh desa atau BPBD Bantul
		b. Tujuan program	1) Tujuan ketangguhan yang akan dicapai Desa Srimartan
2	<i>Input</i>	a. Sumber daya	1) Sumber daya manusia yaitu Stakeholder yang terlibat dalam program destana di Desa Srimartani 2) Daya dukung seluruh stakeholders dalam program destana di Desa Srimartani 3) Sumber pendanaan program destana di Desa Srimartani 4) Bentuk alokasi dana pada program destana di Desa Srimartani 5) Ketersediaan sarana prasarana

No	Komponen Evaluasi	Indikator	Parameter
			penunjang program destana yang ada di Desa Srimartani
		b. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat peraturan desa mengenai penanggulangan bencana di Desa Srimartani 2) Terdapat dokumen perencanaan serangkaian kegiatan kebencanaan yaitu dokumen kajian risiko bencana, rencana kontinjensi, dan rencana penanggulangan bencana 3) Rencana penanggulangan bencana sudah terintegrasi dengan RPJM Desa Srimartani 4) Terdapat kerjasama antara Desa Srimartani dengan LSM atau pihak swasta dalam pelaksanaan program destana
3	<i>Process</i>	a. Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan yang dilakukan dalam kegiatan program destana 2) Terdapat kerangka acuan kerja yang berisi rencana anggaran, target yang akan dicapai, penanggung jawab, dan jadwal kegiatan 3) Informasi rencana kegiatan tersampaikan kepada masyarakat Desa Srimartani
		b. Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam kegiatan kebencanaan di Desa Srimartani 2) Terdapat kesesuaian antara anggaran dan pengeluaran dalam program destana di Desa Srimartani 3) Partisipasi masyarakat dalam program destana 4) Perlindungan kelompok rentan dalam program destana 5) Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program destana
		c. Monitoring dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat aktivitas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap program Destana di Desa Srimartani 2) Terdapat dokumen laporan hasil

No	Komponen Evaluasi	Indikator	Parameter
			<p>monitoring dan evaluasi program destana di Desa Srimartani</p> <p>3) Terdapat rencana tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi program destana di Desa Srimartani</p>
4	<i>Product</i>	a. Hasil	<p>1) Terdapat kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan untuk seluruh masyarakat Desa Srimartani</p> <p>2) Terdapat kegiatan pengembangan kapasitas yaitu pendidikan dan pelatihan untuk perangkat desa, relawan, dan FPRB Desa Srimartani</p> <p>3) Terdapat sistem peringatan dini yang dapat menyampaikan informasi secara akurat dan tepat waktu ke seluruh masyarakat Desa Srimartani</p> <p>4) Terdapat jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang aman di Desa Srimartani</p>
		b. Dampak	<p>1) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang dapat diukur dengan apakah masyarakat tahu mengenai kondisi dan ancaman bencana yang ada di Desa Srimartani serta keikutsertaan dalam diklat kebencanaan dan pemahaman mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan saat terjadi bencana</p> <p>2) Perubahan sikap di masyarakat yang dapat diukur dengan tindakan masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, partisipasi dalam FPRB, terlibat aktif dalam kegiatan destana, dan kondisi rumah yang siaga bencana.</p> <p>3) Keberhasilan relawan dan masyarakat dalam merespon kondisi darurat dan memulihkan dengan cepat saat terjadi bencana di Desa Srimartani</p>
		c. Keberlanjutan	<p>1) Komitmen BPBD Kabupaten Bantul untuk mendukung keberlanjutan program destana di Desa Srimartani yang dapat diukur dari adanya MoU antara pihak BPBD dan pihak desa</p> <p>2) Komitmen pemerintah desa untuk keberlanjutan program destana di Desa</p>

No	Komponen Evaluasi	Indikator	Parameter
			<p>Srimartani yang dapat diukur dari adanya alokasi APBDes untuk program destana dan terintegrasinya rencana penanggulangan bencana dengan RPJM dan RKP Desa Srimartani</p> <p>3) Komitmen anggota FPRB dan relawan untuk keberlanjutan program destana di Desa Srimartani yang dapat diukur dari adanya pertemuan rutin dan kegiatan pendidikan serta pelatihan untuk anggota</p> <p>4) Komitmen masyarakat untuk keberlanjutan program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani yang dapat diukur dari keaktifan masyarakat dalam FPRB dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan destana</p>

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis metode penelitian yang lahir dari paradigma postpositivisme. Secara umum penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata yang diperoleh dari catatan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Emzir, 2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan melibatkan interpretasi dan menggunakan berbagai metode. Penelitian kualitatif berusaha untuk memakanai dan mentafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurut Bogdan dan Biklen (2008) dalam (Emzir, 2014) terdapat lima ciri penelitian kualitatif yaitu: (1)

Naturalistik, penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrument penelitian. (2) Data deskriptif, data yang dikumpulkan dan hasil penelitian berupa kata-kata yang berasal dari hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan, dan rekaman. (3) Proses, peneliti kualitatif lebih berfokus pada proses daripada hasil. (4) Induktif, peneliti cenderung menganalisis data mereka secara induktif. (5) Makna, yang dimaksud dengan makna adalah peneliti kualitatif peduli dengan perspektif partisipan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang pemilihan lokasi adalah berdasarkan data Kajian Risiko Bencana (2016-2020) yang dikeluarkan oleh BPBD DIY. Desa Srimartani dipilih karena memiliki risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor. Selain itu Desa Srimartani merupakan desa yang mewakili Kabupaten Bantul dalam lomba desa tangguh bencana se provinsi DIY pada akhir 2018. Desa Srimartani sudah ditetapkan menjadi Desa Tangguh Bencana sejak November 2017.

1.9.3 Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimartani, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani, relawan Desa Srimartani, dan masyarakat Desa Srimartani.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli data melalui wawancara dan observasi. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi akan dilakukan di BPBD Kabupaten Bantul dan Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

Narasumber yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah Staff Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul yang menjadi fasilitator di Desa Srimartani, Perangkat Desa Srimartani, Ketua dan anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani, dan masyarakat Desa Srimartani. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterlibatan atau peran narasumber dalam berjalannya program desa tangguh bencana di Desa Srimartani. BPBD Bantul khususnya Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan koordinator sekaligus fasilitator dalam pengembangan desa tangguh bencana. Sedangkan perangkat desa, ketua dan anggota FPRB, serta masyarakat Desa Srimartani merupakan pelaksana sekaligus sasaran program.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui dokumentasi dalam bentuk

jurnal, peraturan, laporan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini data yang diperlukan adalah dokumen yang berkaitan dengan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani. Beberapa dokumen yang diperlukan diantaranya adalah Peraturan Desa Srimartani tentang Penanggulangan Bencana, RPJM Desa Srimartani 2012-2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018, APBDesa Srimartani tahun 2017 dan 2018, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Srimartani, dokumen Rencana Kontijensi Desa Srimartani, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Srimartani tahun 2017 dan 2018.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Emzir (2014) mengatakan bahwa sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Menurut Gay dan Airasian dalam (Emzir, 2014) ketiga jenis data ini memiliki satu aspek kunci, yaitu analisisnya terutama tergantung pada ketrampilan interpretasi dari peneliti. Penelitian ini juga menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

a. Observasi

Emzir (2014) mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai kegiatan yang menaruh perhatian dan fokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir, 2014). Sedangkan Adler dan Adler dalam (Salim, 2006) menyebutkan dua prinsip dalam observasi yaitu, peneliti tidak boleh

“mencampuri” urusan subyek penelitian dan peneliti harus menjaga sisi alamiah dari subjek penelitian. Observasi berdasarkan peran peneliti dapat dibedakan menjadi observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi (Salim, 2006).

Penelitian ini akan menggunakan observasi non partisipasi dalam pengambilan data. Observasi non partisipasi adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton terhadap gejala atau kejadian yang sesuai dengan topik penelitian, berbeda dengan observasi partisipan dimana peneliti masuk ke masyarakat. Observasi dilakukan di Desa Srimartani dengan mengamati lokasi rawan longsor di 6 Dusun yaitu Pos Piyungan, Umbulsari, Bulusari, Rejosari, Kemloko, dan Mojosari; rumah warga yang pernah terdampak longsor; jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat evakuasi; sistem peringatan dini longsor; serta peralatan relawan FPRB. Beberapa hal yang mempengaruhi observasi adalah tingkat keterlibatan, fokus yang diamati, sikap peneliti, dan lama pengamatan (Salim, 2006).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menghasilkan sumber data primer. Wawancara sangat penting dilakukan terutama dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara sederhana dapat diartikan sebagai pertemuan secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada seseorang sesuai dengan topik penelitian,

kemudian peneliti mencatat dan merekam informasi yang didapat (Emzir, 2014). Berdasarkan bentuk pertanyaannya, jenis wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang jawabannya tidak dibatasi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini diantaranya:

Tabel 5. Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Budianto	Staff Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD Kabupaten Bantul
2	Agus Totok	Staff Sie Pemerintahan	Pemerintah Desa Srimartani
3	Lilik Raharjo	Kepala Urusan Perencanaan	Pemerintah Desa Srimartani
4	Amat Yani	Ketua	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Srimartani
5	Paksi Lingga	Sekretaris	FPRB Srimartani
6	Puji Widiyanto	Anggota relawan	FPRB Srimartani
7	Ngadilan dan Rias		Masyarakat RT 5 Dusun Tambalan, Srimartani
8	Solihin		Masyarakat RT 2 Dusun Mojosari, Srimartani
9	Panut dan Tukijan		Masyarakat Dusun Kemloko Desa Srimartani
10	Choirudin		Masyarakat RT 5 Dusun Bulusari, Srimartani

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, catatan media, peraturan dan sumber lainnya yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

1.9.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data kualitatif berbeda dengan teknik analisa data kuantitatif. Agus Salim (2006) menjelaskan bahwa pada penelitian kuantitatif analisa data baru dapat dilaksanakan setelah aktivitas pengumpulan data selesai, sedangkan pada penelitian kualitatif proses analisa data berlangsung selama proses pengumpulan data hingga pasca pengumpulan data (Salim, 2006). Penelitian penulis menggunakan teknik analisa data model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman dalam (Emzir, 2014) proses analisa data kualitatif dilaksanakan dalam tiga kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data termasuk bagian dari proses analisis data. Reduksi data merupakan proses pemilihan untuk membuang yang tidak perlu, menggolongkan, memfokuskan, dan mengorganisasikan. Kegiatan reduksi dilakukan dengan menelaah seluruh data kasar di lapangan kemudian mentransformasikan ke dalam bentuk ringkasan dari setiap responden atau hasil observasi.

b. Model Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model penyajian data paling umum berupa teks naratif, tetapi teks naratif memiliki kekurangan. Apabila teks tersebut terlalu panjang maka akan sulit bagi penganalisis untuk mencerna informasi dan mengambil

kesimpulan. Maka dari itu terdapat beragam model penyajian data seperti bagan, grafik, diagram, table, dan bentuk lainnya yang berfungsi untuk mempermudah penganalisis untuk melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan (Verifikasi Kesimpulan)

Pada proses pengumpulan data, periset kualitatif mencatat seluruh informasi yang didapat di lapangan sambil mencari makna dari setiap informasi yang didapat. Peneliti kualitatif selama proses pengambilan data secara terus menerus menyediakan kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh. Selama penelitian masih berlangsung setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh (Salim, 2006).